

ABSTRAK

Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah semasa hidupnya secara cuma-cuma menyerahkan sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak guna keperluan penerima hibah melalui cara tak ada pergantian serta dilakukan tanpa pamrih, tanpa kontraprestasi dari pihak yang menerima hibah. Dalam prosedur pemeliharaan data dan kepentingan kepastian hukum peralihan hak atas tanah karena hibah harus segera dilakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA telah menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam praktik penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini terjadi sengketa peralihan hak atas tanah hibah dikarenakan proses peralihan haknya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan proses peralihan hak atas tanah hibah tidak didaftarkan dan kendala-kendala yang menyebabkan proses peralihan hak atas tanah hibah tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Metode pendekatan yang dipakai ialah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis terbagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung terhadap narasumber, dan data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber kepustakaan (*literature research*). Metode analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peralihan hak atas tanah hibah di Kabupaten Pacitan dilakukan menurut hukum adat melihat kekuatan tradisi yang melekat pada masyarakat Kabupaten Pacitan, dengan demikian proses peralihan hak atas tanah karena hibah melalui hukum adat harus tetap diakhiri dengan pendaftaran peralihan hak sesuai dengan KUHPerdara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak didaftarkannya peralihan hak atas tanah karena hibah disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat mengenai kewajiban-kewajiban dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti peralihan hak atas tanah, proses penghibahan yang tidak dilakukan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu penghibahan akan mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum dari penerima hibah. Kendala-kendala yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak didaftarkan adalah kurang adanya perhatian dari lembaga terkait, seperti memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci : *Hibah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah*

ABSTRAC

A grant is an agreement whereby the grantor during his lifetime freely hands over a movable or immovable object for the needs of the grantee with no replacement whatsoever and is done voluntarily, without any contradiction from the grantee. In data maintenance procedures and interests the legal certainty of the transfer of land rights due to grants must be carried out immediately by registering the land at the Land Office. Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA outlines that land registration ends with the issuance of letters of proof of rights, which act as a strong means of proof, in dispute resolution practices. In this study, there was a dispute over the transfer of rights over the grant land because the process of transferring the rights was not carried out in accordance with the applicable provisions.

This study aims to find out and analyze the reasons for the process of transferring land rights over grants not being registered and the obstacles that cause the process of transferring rights over land grants not being registered at the Pacitan District Land Office.

The approach method used is empirical juridical, the research specification uses analytical descriptive. The method used in this research is empirical juridical. The specification of the research is descriptive analytical. The data collection method used by the author is divided into two, namely primary data obtained from direct interviews with informants, and secondary data, namely data obtained from literary sources (literature research). The method of data analysis in this study will be analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that most of the transfer of rights to land grants in Pacitan Regency is carried out according to customary law considering the strength of tradition attached to the people of Pacitan Regency, thus the process of transferring land rights due to grants through customary law must still end with the registration of the transfer of rights according to with the Civil Code to obtain guarantees of legal certainty.

From this study it can be concluded that the transfer of land rights due to grants is not registered due to a lack of legal awareness from the community regarding obligations in terms of carrying out legal actions such as transferring land rights, the granting process which is not carried out by taking into account the legal requirements of a grant will result in weak the legal force of the grantee. The obstacles that cause the transfer of land rights not to be registered are the lack of attention from related institutions, such as providing socialization related to the transfer of land rights

Keywords: Grants, Transfer of Land Rights, Land Registration